

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring berkembangnya era globalisasi saat ini, negara-negara berkembang khususnya Indonesia semakin banyak melahirkan masyarakat yang inovatif. Tidak hanya karena kemauan masing-masing, kebutuhan untuk mengikuti perkembangan di era globalisasi sangat penting agar tetap bertahan dalam kondisi ekonomi yang tidak selalu stabil. Saat ini, banyak masyarakat yang tidak hanya bergantung untuk bekerja di sebuah perusahaan untuk mencukupi kebutuhan hidup. Tidak sedikit pekerja di Indonesia yang mencari peluang tambahan seperti mendirikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Menurut PP No 7 Tahun 2021, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dibagi menjadi tiga klasifikasi, yaitu: Usaha mikro adalah orang perseorangan dan/atau badan ekonomi perseorangan dengan modal kerja paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan untuk tempat usaha dan dengan omzet tahunan sampai dengan 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Usaha Kecil adalah perusahaan dengan modal lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang tidak mencakup seluruh tanah dan bangunan tempat usaha dan mempunyai hasil penjualan tahunan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Usaha menengah adalah perusahaan dengan modal kerja lebih dari Rp5.000.000.000,00 (Rp5 miliar) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (Rp10 miliar), yang mencakup semua tanah dan

bangunan tidak termasuk dan memiliki omzet Rp 15.000.000.000,00. (lima belas ribu juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh ribu juta rupiah).

Perkembangan UMKM di Indonesia sangat pesat beberapa tahun belakangan. Saat ini, perkembangan jumlah pelaku UMKM dapat dipantau melalui *website* resmi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Berikut ini merupakan data perkembangan UMKM di Indonesia dari tahun 2018-2019 yang diperoleh dari *website* resmi Kementerian Koperasi dan UKM :

Tabel 1.1 Perkembangan Jumlah UMKM di Indonesia

Indikator	2018	2019	Perkembangan	
			Jumlah	Persentase
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	64.194.057	65.465.497	1.271.440	1,98
1. Usaha Mikro (UMI)	63.350.222	64.601.352	1.251.130	1,97
2. Usaha Kecil (UK)	783.132	798.679	15.547	1,99
3. Usaha Menengah (UM)	60.702	65.465	4.763	7,85

Sumber : Kementerian Koperasi dan UKM

Berdasarkan data perkembangan jumlah UMKM di atas, dapat diketahui bahwa semakin tahun jumlah pelaku UMKM di Indonesia semakin meningkat. Jika dilihat dari jumlah kenaikannya maka sektor usaha mikro paling banyak yaitu sejumlah 1.251.130 unit. Sedangkan jika dilihat dari segi kenaikan presentase, maka sektor usaha menengah yang paling banyak yaitu sejumlah 7,85%. Dengan semakin meningkatnya jumlah pelaku UMKM, maka diharapkan pengetahuan yang dimiliki para pelaku usaha pun semakin meningkat. Dengan bertambahnya pengetahuan untuk mengelola usahanya, maka para pelaku UMKM dapat meminimalisir kesalahan-

kesalahan dalam pengelolaan. Hal ini juga akan berdampak pada perkembangan dan kesuksesan usaha yang dimiliki.

Salah satu permasalahan yang dihadapi pengelola UMKM adalah akuntansi keuangan, atau yang dikenal dengan istilah simple year closing closing. Saat ini masih banyak UMKM yang hanya melakukan pencatatan dasar pada pembukuan atau mengumpulkan catatan, sehingga informasi keuangan yang diterima belum sempurna. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009:2), tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi tentang kekayaan bersih, posisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan yang berguna bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi- pembuatan oleh orang. bahwa mereka tidak dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Berdasarkan tujuan pembukuan tahunan, pengelola UMKM harus mengetahui bagaimana menerapkan standar akuntansi yang sesuai dengan pembukuan UMKM. Dengan menggunakan akuntansi yang baik, para pemangku kepentingan UMKM diharapkan dapat mengetahui bagaimana bisnis mereka berjalan dan seberapa sehat mereka dan seberapa besar keuntungan bisnis mereka dalam jangka waktu tertentu.

Standar akuntansi yang digunakan khusus untuk UMKM adalah Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM). Karena banyaknya tekanan dari berbagai pihak, terutama pelaku UMKM dan pihak eksternal, untuk memberikan standar akuntansi khusus bagi UMKM, maka Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) ke Indonesia. UMKM, sehingga laporan keuangan yang disajikan lebih transparan, efisien dan bertanggung jawab. SAK EMKM pada dasarnya disusun dan diterbitkan oleh IAI dengan tujuan melayani UMKM sebagai

pedoman penyusunan laporan keuangan. Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) IAI mengesahkan SAK EMKM pada 2 Oktober 2016. SAK EMKM dibuat sangat sederhana sehingga menjadi standar akuntansi yang mudah dipahami oleh para pelaku UMKM di Indonesia. Dengan adanya SAK EMKM di masa yang akan datang tentunya diharapkan UMKM di Indonesia mampu membuat buku besar untuk menghasilkan laporan keuangan yang lebih informatif untuk membantu meningkatkan permodalan bagi investor dan kreditur.

Namun, pada kenyataan yang terjadi masih banyak UMKM yang belum melakukan pencatatan sebagaimana mestinya dan melakukan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM. Adapun faktor yang sering menjadi alasan utama banyak pelaku UMKM tidak menerapkan SAK EMKM adalah tingkat pendidikan dan kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya penerapan SAK EMKM dalam menyusun laporan keuangan UMKM. Salah satu UMKM yang peneliti pilih sebagai narasumber adalah KIN Outlet. Pemilik KIN Outlet mengakui belum pernah mengetahui tentang SAK EMKM. Maka, pemilik KIN Outlet masih melakukan pembukuan yang sederhana dengan hanya mencatat pembelian dan penjualan sehari-hari tanpa melakukan rekapitulasi bulanan. Hal ini tentu akan mempengaruhi perkembangan KIN Outlet.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) pada KIN Outlet”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) pada KIN Outlet?
2. Apa saja kendala yang dihadapi KIN Outlet dalam menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM)?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) pada KIN Outlet.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi KIN Outlet dalam menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM).

1.4 Manfaat Penelitian

1. Aspek Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan penulis serta berfikir ilmiah khususnya tentang penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga peneliti dapat membandingkan kesesuaian antara teori dengan praktek yang diperoleh penulis selama perkuliahan serta pengimplementasiannya dalam kehidupan di masa mendatang.

2. Aspek Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan wawasan bagi pembaca dan referensi bagi peneliti selanjutnya.

3. Aspek Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi KIN Outlet untuk memperbaiki pengelolaan usaha terutama dalam penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku sehingga menjadi laporan keuangan yang layak dan berguna di kemudian hari.